



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK-RI)
UNIT KERJA : BPK PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YITNO
2. Jabatan : KEPALA SUBAUDITORAT
3. NHK : 56785

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.824.910.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/110 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 240.100.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 237 m2/50 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 395.960.000
3. Tanah Seluas 790 m2 di KAB / KOTA TULUNGAGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 32.000.000
4. Tanah Seluas 1600 m2 di KAB / KOTA TULUNGAGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
5. Tanah Seluas 700 m2 di KAB / KOTA TULUNGAGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
6. Tanah Seluas 174 m2 di KAB / KOTA TULUNGAGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
7. Tanah Seluas 994 m2 di KAB / KOTA TULUNGAGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 56.850.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 133 m2/54 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 104 m2/54 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 77.500.000

1. MOTOR, HONDA KHARISMA NF 125 D --- Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000



2. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp.
3.000.000
3. MOTOR, YAMAHA JUPITER Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp.
2.500.000
4. MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp.
70.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	83.724.348
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	111.737.047
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	2.097.871.395
III. HUTANG	Rp.	184.601.653
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.913.269.742

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.